

Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah pada Program Kredit Usaha Rakyat di BNI Kantor Cabang Sengeti

Dyora Vebrizya¹, Eja Armaz Hardi², Solichah³

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

dyoravebby@gmail.com, eja.armaz.hardi@uinjambi.ac.id, solichah@uinjambi.ac.id

ABSTRACT

Info Artikel:

Diterima 01 Juni 2026

Direview 08 Juni 2026

Disetujui 10 Juni 2026

Keywords: Risk Mitigation, Non-Performing Financing, KUR, NPL, Banking.

Purpose—This study aims to analyze the mitigation of non-performing financing risk in the People's Business Credit (KUR) program at Bank Negara Indonesia (BNI) Sengeti Branch Office and to identify the obstacles encountered in its implementation.

Design/methodology—This study employed a qualitative descriptive approach. Informants were selected using purposive sampling and consisted of two key informants, namely the Business Team Leader of BNI Sengeti Branch Office and one KUR debtor. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The data were analyzed using the Miles and Huberman interactive analysis model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing.

Findings— The results indicate that risk mitigation of non-performing financing is conducted through debtor feasibility assessment, field surveys, monitoring of financing utilization, debtor guidance, and financing restructuring. A distinctive finding of this study is that risk mitigation at BNI Sengeti relies heavily on direct field observation and continuous monitoring because most KUR debtors do not maintain adequate financial records. In addition, the majority of debtors operate in the agricultural and plantation sectors, making financing performance highly vulnerable to commodity price fluctuations and weather conditions. The study also found that some debtors perceive KUR as a government assistance program, which may reduce payment discipline and increase the risk of moral hazard. The main obstacles faced in risk mitigation include low financial literacy, weak business administration, misuse of financing funds, and unstable economic conditions affecting debtors' business performance.

Publishing Institution :

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang Sumatera Selatan (30263)

E-Mail :

motivasi.feb.ump@gmail.com

Access this article online

Quick Response Code:



Website:

<http://jurnal.um-palembang.ac.id/motivasi>

p-ISSN: 2548-1622

e-ISSN: 2716-4039 Jurnal **MOTIVASI**

A. PENDAHULUAN

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan atau kredit kepada masyarakat yang membutuhkan (Dalimunthe & Lubis, 2023). Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan dan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan, bank berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan menciptakan sistem keuangan yang inklusif (Masdiana et al., 2025).

Pelaku usaha mikro dan kecil memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah karena mampu menciptakan lapangan

kerja dan memenuhi kebutuhan masyarakat (April et al., 2024). Namun, perkembangan usaha tersebut sering menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan modal, rendahnya akses pembiayaan formal, dan lemahnya pengelolaan usaha (Al Wardhana, E Silaningsih, 2025). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menghadirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai bentuk pembiayaan yang lebih inklusif bagi masyarakat produktif (Efendi, 2025).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pembiayaan pemerintah yang ditujukan kepada pelaku usaha produktif yang layak namun belum memiliki agunan yang memadai untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan (Qomariah & Febriana, 2025). Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing usaha, memperluas lapangan kerja, serta mendukung pengentasan kemiskinan melalui penguatan sektor usaha mikro dan kecil. Dalam pelaksanaannya, pemerintah memberikan penjaminan sebagian risiko kredit sehingga bank penyalur memiliki keberanian lebih besar dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.

Dalam perspektif Islam, pengelolaan pembiayaan merupakan amanah yang harus dijalankan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip kehati-hatian dalam transaksi keuangan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan pembiayaan serta menghindari kerugian bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan yang baik sejalan dengan prinsip manajemen keuangan syariah dan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-māl) (Fatkhullah & Zen, 2026).

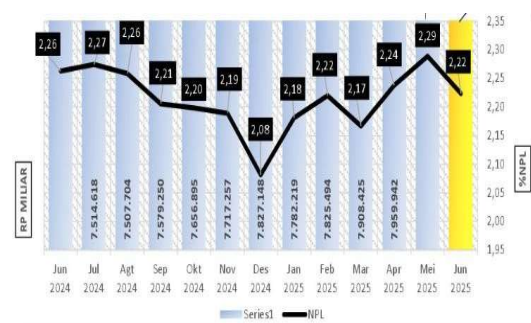
Salah satu bank yang ditunjuk pemerintah sebagai penyalur KUR adalah Bank Negara Indonesia. Sebagai bank dengan kapasitas permodalan besar, BNI memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan usaha masyarakat, termasuk di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Di wilayah Sengeti, penyaluran KUR difokuskan pada pelaku usaha sektor pertanian, perdagangan, peternakan, dan usaha rumah tangga yang sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar dan faktor eksternal lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan risiko pembiayaan pada sektor ini relatif tinggi sehingga memerlukan manajemen risiko yang baik.

Risiko utama dalam penyaluran KUR adalah terjadinya pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL), yaitu kondisi ketika debitur tidak mampu memenuhi

kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian kredit. Tingginya NPL dapat memengaruhi kualitas aset bank, menurunkan profitabilitas, serta mengganggu stabilitas keuangan perbankan (Pradita, 2013). Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan batas maksimal rasio NPL bank sebesar 5% sebagai indikator kesehatan pembiayaan perbankan.

Penyaluran KUR juga rentan terhadap adverse selection dan moral hazard. Adverse selection terjadi ketika bank mengalami kesulitan memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi usaha calon debitur akibat lemahnya administrasi dan pembukuan usaha. Sementara itu, moral hazard muncul ketika debitur menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai tujuan usaha atau mengabaikan kewajiban pembayaran setelah kredit diterima. Kedua kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi terjadinya pembiayaan bermasalah (Noviansyah et al., 2025).

Mitigasi risiko menjadi langkah penting dalam mengendalikan potensi pembiayaan bermasalah. Mitigasi risiko dilakukan melalui serangkaian kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi, memantau, dan mengendalikan risiko pembiayaan agar tidak berkembang menjadi kerugian yang lebih besar. Penerapan strategi pengelolaan risiko yang tepat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan usaha dan stabilitas keuangan lembaga pembiayaan, terutama pada sektor yang memiliki tingkat ketidakpastian tinggi (Sudanto, 2024). Dalam konteks perbankan, penerapan mitigasi risiko diperlukan untuk menjaga stabilitas pembiayaan, meningkatkan kualitas kredit, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap bank.



Sumber: OJK, 2025

Gambar 1. Perkembangan Kredit dan NPL Bank Umum

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, perkembangan rasio NPL Bank Umum selama periode Juni 2024 hingga Juni 2025 menunjukkan kondisi yang relatif stabil

dan masih berada di bawah batas maksimum 5%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perbankan secara umum masih mampu menjaga kualitas pembiayaan meskipun menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

Di BNI Kantor Cabang Sengeti, risiko pembiayaan dipengaruhi oleh karakteristik usaha masyarakat yang bergantung pada hasil perkebunan, perdagangan kecil, dan usaha rumah tangga. Selain faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas dan kondisi cuaca, rendahnya literasi keuangan masyarakat juga menjadi penyebab munculnya pembiayaan bermasalah. Rendahnya literasi keuangan masyarakat juga menjadi penyebab munculnya pembiayaan bermasalah. Literasi keuangan yang rendah dapat memengaruhi kemampuan pelaku usaha dalam mengelola arus kas, memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga, serta mengambil keputusan keuangan secara rasional (Christiana et al., 2024). Sebagian debitur masih mencampurkan kebutuhan usaha dengan kebutuhan konsumtif sehingga memengaruhi kemampuan pembayaran kredit (Sitanggung et al., 2025).

Hasil wawancara dengan pihak internal BNI Sengeti menunjukkan bahwa kendala utama pembiayaan bermasalah berasal dari penggunaan dana yang tidak sesuai tujuan usaha serta lemahnya pembukuan usaha debitur. Selain itu, beberapa debitur menganggap keterlambatan pembayaran tidak menjadi masalah karena KUR merupakan program pemerintah, sehingga kedisiplinan pembayaran menjadi rendah.

Tabel 1. Perkiraan Data Penyaluran KUR dan Tingkat NPL di BNI Kantor Cabang Sengeti

Tahun	Jumlah Debitur KUR	Perkiraan Total Penyaluran	Perkiraan NPL (%)	Ket
2023	± 260 debitur	± Rp8-10 m	1,0% - 1,8%	Kondisi relatif stabil
2024	± 280 debitur	± Rp10-12 m	1,3% - 2,2%	Fluktuasi usaha debitur
2025	298 debitur	± Rp12-15 m	1,8% - 2,5%	Risikomeningkat namun terkendali

Sumber: BNI, 2025

Data internal BNI Kantor Cabang Sengeti menunjukkan bahwa tingkat NPL KUR berada pada kisaran 1%–2,5% dan masih berada di bawah batas maksimal yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun demikian, potensi peningkatan risiko tetap perlu diantisipasi karena sebagian besar debitur memiliki usaha

yang rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi dan pasar.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas risiko dan pengelolaan pembiayaan dari berbagai perspektif menemukan bahwa UMKM menghadapi risiko keuangan, risiko produk, dan risiko pasar yang memengaruhi keberlangsungan usaha (Mutmainah, 2025). Lestari (2020) menunjukkan bahwa pedagang pasar tradisional menghadapi risiko penurunan omzet akibat persaingan pasar modern dan perlu menerapkan strategi adaptasi untuk mempertahankan usaha. Rosalina dan Lestari (2019) menemukan bahwa peningkatan Non-Performing Loan (NPL) berpengaruh terhadap penurunan penyaluran kredit oleh bank (Aini et al., 2024). Sementara itu, Alya dan Rahman (2024) mengkaji implementasi program KUR pada perbankan syariah dan menemukan bahwa literasi keuangan menjadi salah satu tantangan utama. Penelitian (Rahardiansyah et al., 2022) menunjukkan bahwa moral hazard debitur merupakan salah satu faktor dominan yang menyebabkan pembiayaan bermasalah sehingga diperlukan pengawasan dan monitoring yang lebih intensif.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah membahas risiko usaha, pengaruh NPL, implementasi KUR, dan mitigasi risiko pembiayaan, masih terdapat keterbatasan dalam kajian yang secara khusus menganalisis mitigasi risiko pembiayaan bermasalah pada Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tingkat kantor cabang bank. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya berfokus pada risiko usaha UMKM, pembiayaan syariah, atau pengaruh NPL terhadap penyaluran kredit, sehingga belum banyak yang mengkaji strategi mitigasi risiko dan kendala implementasinya pada debitur KUR di Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Sengeti. Karakteristik debitur yang didominasi sektor perkebunan, perdagangan kecil, dan usaha rumah tangga juga memberikan konteks yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya (Makandolu et al., 2014). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis strategi mitigasi risiko pembiayaan bermasalah serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program KUR di BNI Kantor Cabang Sengeti.

Berdasarkan uraian fenomena, penelitian terdahulu, dan research gap yang telah dipaparkan, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mitigasi risiko pembiayaan

bermasalah pada Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi mitigasi risiko yang diterapkan oleh BNI Kantor Cabang Sengeti serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam upaya menekan pembiayaan bermasalah pada debitur KUR. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian manajemen risiko perbankan serta menjadi bahan pertimbangan bagi perbankan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko pembiayaan.

B. KAJIAN PUSTAKA

Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang muncul akibat ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah ditetapkan (Rahmawati, 2020). Dalam kegiatan perbankan, risiko ini menjadi salah satu risiko utama karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan operasional, profitabilitas, dan tingkat kesehatan bank. Risiko pembiayaan muncul akibat adanya ketidakpastian mengenai kemampuan debitur dalam mengembalikan dana yang telah disalurkan oleh bank (Sunaryo et al., 2021).

Pembiayaan sendiri merupakan penyediaan dana oleh lembaga keuangan kepada nasabah untuk mendukung kegiatan produktif maupun konsumtif. Dalam konteks ekonomi, pembiayaan memiliki fungsi penting sebagai sarana peningkatan produktivitas usaha, distribusi dana, dan pemerataan ekonomi masyarakat. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi salah satu bentuk pembiayaan yang ditujukan untuk memperluas akses modal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (Naheri et al., 2024).

Risiko pembiayaan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi lemahnya analisis kelayakan debitur, kurang optimalnya pengawasan pembiayaan, serta ketidaktepatan penentuan plafon pembiayaan. Sementara faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi, fluktuasi harga komoditas, perubahan pasar, hingga bencana alam yang dapat memengaruhi kemampuan bayar debitur.

Dalam praktik perbankan, risiko pembiayaan diukur melalui rasio Non-Performing Loan (NPL) atau Non-Performing Financing (NPF). Rasio tersebut menunjukkan tingkat pembiayaan bermasalah dibandingkan

dengan total pembiayaan yang disalurkan bank. *NPL < 5%* Menurut Otoritas Jasa Keuangan, rasio NPL yang sehat berada di bawah 5% (Samsu et al., 2013). Semakin tinggi rasio NPL, semakin besar pula risiko yang dihadapi bank sehingga diperlukan penerapan manajemen risiko yang efektif.

Dalam teori ekonomi dan keuangan, risiko pembiayaan juga berkaitan dengan *asymmetric information*, yaitu ketidakseimbangan informasi antara pihak bank dan debitur. Kondisi ini melahirkan dua fenomena penting, yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*, yang menjadi penyebab utama munculnya pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, bank perlu menerapkan strategi mitigasi risiko melalui proses analisis kelayakan, monitoring, evaluasi berkala, dan restrukturisasi pembiayaan agar kualitas pembiayaan tetap terjaga.

Adverse Selection

Adverse selection merupakan kondisi ketidakseimbangan informasi antara pihak bank dan calon debitur sebelum pembiayaan diberikan (Abdillah & Jannah, 2024). Dalam situasi ini, calon debitur memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi usaha dan kemampuan keuangannya dibandingkan pihak bank. Ketidakseimbangan informasi tersebut menyebabkan bank berpotensi salah menilai kelayakan calon debitur sehingga meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah.

Dalam konteks perbankan, *adverse selection* terjadi ketika bank kesulitan membedakan debitur berisiko tinggi dan debitur yang benar-benar layak menerima pembiayaan. Keterbatasan informasi, lemahnya administrasi usaha, serta minimnya pembukuan keuangan pada usaha mikro menyebabkan proses penilaian kelayakan menjadi kurang optimal. Akibatnya, bank dapat memberikan pembiayaan kepada debitur yang sebenarnya memiliki risiko gagal bayar tinggi.

Fenomena *adverse selection* juga dipengaruhi oleh perilaku calon debitur yang terkadang menyampaikan informasi tidak sepenuhnya akurat demi memperoleh pembiayaan. Beberapa calon debitur dapat melebih-lebihkan kondisi usaha atau menyembunyikan kewajiban pinjaman lain sehingga proses analisis bank menjadi tidak tepat. Kondisi ini semakin sulit diidentifikasi pada usaha mikro yang belum memiliki sistem pencatatan usaha yang baik.

Dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR), *adverse selection* menjadi tantangan penting karena sebagian besar debitur berasal dari sektor usaha informal dan mikro. Keterbatasan dokumen usaha, fluktuasi pendapatan, serta rendahnya literasi keuangan menyebabkan bank harus mengandalkan observasi lapangan dan wawancara dalam menilai kelayakan debitur. Oleh karena itu, penguatan proses *screening*, verifikasi data, dan penerapan prinsip kehati-hatian menjadi langkah penting untuk meminimalkan *adverse selection* dalam penyaluran pembiayaan.

Moral Hazard

Moral hazard merupakan perilaku menyimpang yang muncul setelah pembiayaan diberikan, ketika debitur tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan awal. Konsep ini berkaitan dengan lemahnya pengawasan dan ketidakseimbangan informasi setelah dana dicairkan, sehingga debitur memiliki peluang untuk bertindak tidak sesuai tujuan pembiayaan.

Dalam praktik perbankan, moral hazard dapat berupa penggunaan dana pembiayaan untuk kepentingan konsumtif, pengabaian kewajiban pembayaran, atau pengelolaan usaha yang tidak bertanggung jawab. Pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR), moral hazard sering terjadi karena sebagian debitur menganggap bahwa pembiayaan tersebut merupakan bantuan pemerintah sehingga risiko gagal bayar tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka (Aziz et al., 2016).

Selain berasal dari debitur, moral hazard juga dapat muncul dari internal lembaga keuangan, seperti lemahnya pengawasan, tekanan target penyaluran pembiayaan, atau proses analisis yang tidak dilakukan secara optimal. Kondisi ini meningkatkan potensi pembiayaan bermasalah karena keputusan pembiayaan tidak sepenuhnya didasarkan pada kondisi riil debitur (Yulianti et al., 2025).

Faktor lain yang memengaruhi moral hazard adalah rendahnya literasi keuangan masyarakat dan lemahnya monitoring pasca-penyaluran pembiayaan. Debitur yang tidak memahami pentingnya menjaga reputasi kredit cenderung menganggap keterlambatan pembayaran bukan masalah serius. Di sisi lain, keterbatasan jumlah petugas lapangan menyebabkan proses pengawasan terhadap penggunaan dana pembiayaan tidak berjalan optimal.

Untuk meminimalkan moral hazard, bank perlu memperkuat strategi mitigasi risiko melalui edukasi debitur, monitoring berkala, verifikasi penggunaan dana, serta penerapan sistem pengawasan yang lebih ketat. Pendekatan ini penting agar pembiayaan digunakan secara produktif dan debitur memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Strategi mitigasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya menekan pembiayaan bermasalah dan menjaga kualitas pembiayaan KUR secara berkelanjutan (Ikhsani Wardhana et al., 2025).

Maqashid Syariah

Maqashid Syariah merupakan konsep dalam hukum Islam yang menjelaskan tujuan utama ditetapkannya syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Dalam konteks ekonomi dan keuangan, Maqashid Syariah menjadi landasan dalam membangun sistem keuangan yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Adesty, 2025).

Salah satu tujuan utama Maqashid Syariah yang relevan dengan penelitian ini adalah *hifz al-mal*, yaitu menjaga harta. Konsep ini menekankan bahwa harta harus diperoleh, dikelola, dan digunakan secara benar serta memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat. Dalam praktik pembiayaan, dana yang disalurkan harus digunakan untuk kegiatan produktif dan tidak disalahgunakan untuk aktivitas yang merugikan.

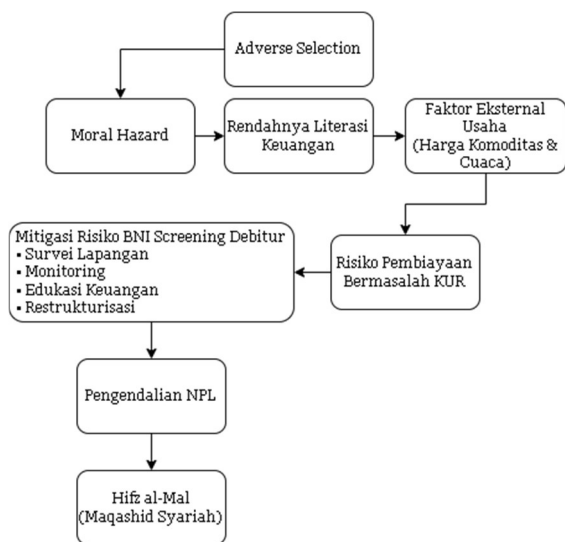
Selain menjaga harta, Maqashid Syariah juga berkaitan dengan *hifz an-nafs*, yaitu menjaga keberlangsungan hidup dan kesejahteraan manusia (Shafira Putri et al., 2025). Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada dasarnya bertujuan membantu pelaku usaha mikro memperoleh modal usaha agar mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mempertahankan keberlangsungan hidupnya (Andriyani, 2023).

Namun, ketika pembiayaan tidak dikelola dengan baik dan berujung pada pembiayaan bermasalah, maka tujuan Maqashid Syariah tidak tercapai secara optimal. Penggunaan dana yang tidak sesuai tujuan, lemahnya tanggung jawab debitur, serta rendahnya pengelolaan usaha dapat menyebabkan kerugian bagi debitur maupun pihak bank.

Oleh karena itu, penerapan Maqashid Syariah dalam pembiayaan tidak hanya menekankan aspek keuntungan ekonomi, tetapi juga tanggung jawab moral, keadilan, dan

kemaslahatan bersama. Dalam konteks mitigasi risiko pembiayaan bermasalah, pendekatan Maqashid Syariah menjadi penting untuk memastikan bahwa proses pembiayaan berjalan secara adil, produktif, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh karena itu, strategi mitigasi risiko yang diterapkan bank tidak hanya bertujuan menjaga kesehatan pembiayaan, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan *hifz al-mal* melalui pengelolaan dana yang amanah dan produktif.

Berdasarkan teori risiko pembiayaan, *adverse selection*, *moral hazard*, dan Maqashid Syariah, penelitian ini memandang bahwa pembiayaan bermasalah pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dipengaruhi oleh faktor internal debitur maupun faktor eksternal usaha. Faktor internal meliputi *adverse selection*, *moral hazard*, dan rendahnya literasi keuangan, sedangkan faktor eksternal meliputi fluktuasi harga komoditas dan kondisi usaha masyarakat. Untuk meminimalkan risiko tersebut, pihak bank menerapkan berbagai strategi mitigasi risiko melalui *screening* debitur, survei lapangan, monitoring penggunaan dana, edukasi keuangan, dan restrukturisasi pembiayaan. Strategi tersebut diharapkan mampu menekan tingkat pembiayaan bermasalah (NPL) dan mendukung tercapainya tujuan Maqashid Syariah, khususnya *hifz al-mal* (menjaga harta).



Gambar 2. Kerangka Konseptual Penelitian

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif (Sugiyono, 2023). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai pembiayaan

bermasalah pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta strategi mitigasi risiko yang diterapkan oleh Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Sengeti. Penelitian kualitatif digunakan untuk menggali informasi secara langsung dari narasumber sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

Penelitian dilaksanakan di Bank Negara Indonesia pada tahun akademik 2025 selama kurang lebih dua bulan, dimulai dari tahap persiapan penelitian, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses penyaluran serta pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian mengenai mitigasi risiko pembiayaan bermasalah pada Program KUR di BNI Kantor Cabang Sengeti.

Informan penelitian terdiri atas dua orang yang dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Program KUR, yaitu seorang *Business Team Leader* BNI Kantor Cabang Sengeti yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pembiayaan KUR dan seorang debitur KUR yang menjadi penerima pembiayaan. Kedua informan dipilih karena dianggap mampu memberikan informasi yang mendalam mengenai penyebab pembiayaan bermasalah serta strategi mitigasi risiko yang diterapkan oleh bank.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu pihak internal BNI Kantor Cabang Sengeti dan debitur KUR yang dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling*. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai penyebab pembiayaan bermasalah, strategi mitigasi risiko, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pembiayaan KUR. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan, buku, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang berkaitan dengan pembiayaan, mitigasi risiko, dan program KUR.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses penyaluran dan

pengawasan pembiayaan KUR di lapangan. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai faktor penyebab pembiayaan bermasalah serta strategi mitigasi risiko yang diterapkan bank. Adapun dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa foto, catatan, maupun dokumen yang relevan dengan penelitian.

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan member checking (Husnullail, 2024). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, yaitu pihak internal BNI Kantor Cabang Sengeti dan debitur KUR. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga informasi yang diperoleh dapat saling menguatkan. Selain itu, peneliti juga menerapkan member checking dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan untuk memastikan bahwa data dan interpretasi yang dilakukan peneliti sesuai dengan informasi yang dimaksud oleh informan. Melalui teknik tersebut, data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian (Kase et al., 2023). Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk memudahkan proses pemahaman dan analisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses menginterpretasikan temuan penelitian serta menghubungkannya dengan teori manajemen risiko dan manajemen keuangan syariah guna memperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian. Ketiga tahapan tersebut dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga diperoleh data yang kredibel.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Sengeti, diperoleh gambaran bahwa proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang

saling berkaitan, mulai dari proses pengajuan, analisis pembiayaan, pengawasan, hingga mitigasi risiko terhadap kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Dalam praktiknya, pembiayaan KUR tidak hanya dipahami sebagai proses administratif semata, tetapi juga sebagai bentuk hubungan sosial-ekonomi antara pihak bank dan debitur yang dipengaruhi oleh berbagai kondisi internal maupun eksternal.

Program KUR menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan akses modal usaha (Ulfa, 2020). Di wilayah Sengeti, pembiayaan KUR banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang bergerak di sektor perdagangan kecil, pertanian, perkebunan, dan usaha rumahan. Melalui pembiayaan tersebut, masyarakat memperoleh tambahan modal untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Namun demikian, dalam pelaksanaannya pembiayaan KUR juga menghadapi berbagai risiko, terutama risiko pembiayaan bermasalah yang dapat memengaruhi kualitas pembiayaan dan keberlangsungan program KUR itu sendiri.

Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah pada KUR di BNI Kantor Cabang Sengeti

Berdasarkan hasil penelitian, mitigasi risiko terhadap pembiayaan bermasalah pada program KUR di BNI Kantor Cabang Sengeti dilakukan secara sistematis sejak tahap awal sebelum pembiayaan diberikan hingga tahap pengawasan setelah pembiayaan dicairkan. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pihak bank menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) secara konsisten guna meminimalkan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Pada tahap awal, pihak bank melakukan proses seleksi administratif terhadap calon debitur melalui pemeriksaan identitas, legalitas usaha, kelengkapan dokumen, serta pengecekan riwayat kredit. Selain itu, pihak bank juga melakukan survei lapangan secara langsung untuk melihat kondisi usaha debitur secara nyata. Survei lapangan menjadi bagian penting karena sebagian besar pelaku usaha mikro belum memiliki laporan keuangan yang tertata secara formal. Melalui observasi langsung, pihak bank dapat menilai karakter debitur, kapasitas usaha, potensi pendapatan, serta kemampuan membayar angsuran di masa mendatang.

Hal tersebut diperkuat melalui hasil wawancara dengan Ibu Mulyani selaku *Business Team Leader* yang menyatakan

“Dalam proses analisis pembiayaan Kredit Usaha Rakyat tidak hanya berpatokan pada kelengkapan dokumen administratif saja. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, kami melakukan survei langsung ke lokasi usaha. Dari situ kami bisa menilai apakah usaha tersebut benar-benar berjalan, bagaimana aktivitas usahanya, serta potensi penghasilannya.”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama pembiayaan bermasalah berasal dari perilaku debitur dalam mengelola dana pembiayaan. Sebagian debitur masih menggunakan dana KUR untuk kebutuhan di luar kepentingan usaha, seperti kebutuhan rumah tangga maupun keperluan konsumtif lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan modal usaha menjadi berkurang sehingga usaha tidak berkembang secara optimal dan kemampuan membayar angsuran ikut menurun.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Ibu Mulyani selaku *Business Team Leader* yang menyampaikan:

“Masih ada beberapa debitur yang menggunakan sebagian dana KUR untuk kebutuhan rumah tangga atau keperluan lain di luar usaha. Kondisi ini sering menyebabkan modal usaha berkurang sehingga perkembangan usaha tidak sesuai dengan yang direncanakan pada saat pengajuan pembiayaan.”

Temuan diatas menunjukkan adanya moral hazard, yaitu perilaku debitur yang menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai tujuan setelah pembiayaan dicairkan. Menurut teori asimetri informasi, bank tidak selalu mampu mengawasi penggunaan dana secara penuh sehingga potensi penyimpangan penggunaan dana menjadi lebih besar. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Rahardiansyah et al., 2022) yang menyatakan bahwa moral hazard merupakan salah satu penyebab utama pembiayaan bermasalah (Rahardiansyah et al., 2022). Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa BNI Kantor Cabang Sengeti perlu memperkuat monitoring pasca pencairan pembiayaan, khususnya pada debitur yang baru menerima KUR. Selain itu, edukasi mengenai penggunaan dana produktif dan pengelolaan keuangan usaha perlu dilakukan secara berkala untuk mengurangi potensi moral hazard dan meningkatkan keberhasilan usaha debitur.

Selain itu, sebagian besar debitur KUR juga masih memiliki kelemahan dalam pengelolaan administrasi keuangan usaha. Banyak debitur belum melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran usaha secara teratur sehingga pengelolaan usaha menjadi kurang terarah. Rendahnya literasi keuangan tersebut menyebabkan pihak bank mengalami kesulitan dalam memantau perkembangan usaha debitur secara akurat.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Mulyani yang menyatakan:

“Sebagian besar pelaku usaha mikro belum memiliki pembukuan yang rapi. Bahkan ada yang hanya mengingat pemasukan dan pengeluaran tanpa mencatat secara tertulis sehingga kami cukup sulit melihat perkembangan usaha mereka secara akurat.”

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa faktor eksternal turut memengaruhi kelancaran pembayaran angsuran. Sebagian besar debitur KUR di wilayah Sengeti bergerak di sektor perkebunan dan pertanian yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas dan kondisi cuaca. Hal tersebut diperkuat melalui hasil wawancara dengan salah satu debitur KUR yang menyampaikan bahwa:

“Kalau dilihat dari pengalaman di lapangan, saya yang bergerak di sektor perkebunan memang cukup sering mengalami kendala dalam pembiayaan. Hal ini kadang disebabkan oleh kondisi harga komoditas yang tidak stabil. Seperti harga sawit sedang turun cukup jauh, sementara biaya operasional seperti pupuk justru semakin mahal.”

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa pembiayaan bermasalah pada program KUR di BNI Kantor Cabang Sengeti dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu, mitigasi risiko tidak cukup hanya dilakukan melalui analisis awal pembiayaan, tetapi juga perlu disertai pengawasan, edukasi, dan pendampingan usaha secara berkelanjutan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Mutmainah (2025) yang menemukan bahwa aktivitas usaha menghadapi berbagai risiko, seperti risiko keuangan, risiko pasar, dan risiko operasional yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha (Mutmainah, 2025). Meskipun objek penelitian berbeda, keduanya menunjukkan bahwa identifikasi risiko sejak awal menjadi langkah penting dalam

meminimalkan kerugian. Namun demikian, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik pada mitigasi risiko pembiayaan bermasalah KUR melalui proses analisis debitur, monitoring, dan pembinaan pasca pencairan pembiayaan.

Dalam perspektif teori, hasil penelitian ini berkaitan erat dengan teori *adverse selection*. Teori ini menjelaskan bahwa keterbatasan informasi menyebabkan pihak bank mengalami kesulitan dalam membedakan calon debitur yang benar-benar layak dengan debitur yang memiliki potensi gagal bayar. Kondisi tersebut terlihat dari sebagian besar debitur KUR yang tidak memiliki pembukuan usaha secara jelas sehingga bank harus mengandalkan survei lapangan dan pendekatan kualitatif dalam proses analisis pembiayaan.

Selain itu, hasil penelitian juga relevan dengan teori *moral hazard*, yaitu kondisi ketika debitur menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai tujuan awal setelah pembiayaan dicairkan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa beberapa debitur menggunakan dana KUR untuk kebutuhan konsumtif, seperti biaya rumah tangga dan kebutuhan pribadi lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan modal usaha berkurang sehingga usaha tidak berkembang dan kemampuan membayar angsuran menjadi menurun. Oleh karena itu, monitoring secara berkala menjadi strategi penting dalam meminimalkan risiko moral hazard.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai tujuan usaha masih menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pembiayaan bermasalah. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa keberhasilan program KUR tidak hanya ditentukan oleh kualitas analisis pembiayaan, tetapi juga oleh tingkat literasi keuangan debitur. Dengan demikian, edukasi dan pendampingan usaha perlu menjadi bagian dari strategi mitigasi risiko yang berkelanjutan.

Dalam praktiknya, pihak bank juga melakukan pengawasan pasca pencairan melalui monitoring dan komunikasi rutin dengan debitur. Ketika ditemukan keterlambatan pembayaran, pihak bank lebih mengedepankan pendekatan persuasif melalui pembinaan dan komunikasi dibandingkan tindakan represif. Debitur yang masih memiliki potensi usaha akan diberikan solusi seperti restrukturisasi pembiayaan agar tetap dapat menjalankan usahanya dan memperbaiki kondisi keuangannya. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Mulyani:

"Setelah pencairan dana, kami tetap melakukan monitoring secara berkala. Monitoring dilakukan melalui kunjungan langsung maupun komunikasi melalui telepon untuk memastikan usaha tetap berjalan dan pembayaran angsuran lancar."

Temuan ini sejalan dengan penelitian Rosalina dan Lestari (2019) yang menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan risiko kredit memiliki hubungan erat dengan tingkat pembiayaan bermasalah (Rosalina & Lestari, 2019). Semakin efektif proses monitoring dan pengawasan yang dilakukan bank, semakin besar peluang untuk menekan risiko gagal bayar. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Alya (2024) yang menegaskan bahwa keberhasilan program KUR tidak hanya ditentukan oleh penyaluran pembiayaan, tetapi juga oleh pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan kepada debitur (Alya & Rahman, 2024).

Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, mitigasi risiko yang dilakukan pihak bank tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas pembiayaan, tetapi juga mencerminkan upaya menjaga harta (*hifz al-mal*) melalui pengelolaan pembiayaan yang amanah dan produktif. Selain itu, pendekatan persuasif dan restrukturisasi pembiayaan juga mencerminkan nilai kemaslahatan dan keadilan karena bank berupaya membantu debitur mempertahankan keberlangsungan usaha serta menjaga kesejahteraan keluarga mereka.

Dengan demikian, mitigasi risiko pembiayaan bermasalah pada program KUR di BNI Kantor Cabang Sengeti menunjukkan adanya kombinasi antara penerapan manajemen risiko modern dengan nilai-nilai ekonomi syariah yang menekankan pada prinsip kehati-hatian, tanggung jawab, keadilan, dan kemaslahatan bersama.

Kendala dalam Melakukan Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi pihak bank dalam melakukan mitigasi risiko terhadap pembiayaan bermasalah pada program KUR di BNI Kantor Cabang Sengeti. Kendala tersebut berasal dari faktor internal debitur maupun faktor eksternal lingkungan usaha.

Kendala utama berasal dari rendahnya tingkat literasi keuangan debitur. Sebagian besar debitur KUR masih menjalankan usaha secara sederhana dan belum memiliki sistem administrasi keuangan yang baik. Banyak debitur

belum melakukan pencatatan arus kas, pemasukan, maupun pengeluaran usaha secara teratur sehingga pihak bank mengalami kesulitan dalam menilai kondisi usaha secara objektif. Ibu Mulyani menjelaskan:

"Banyak debitur yang belum memisahkan keuangan usaha dengan keuangan rumah tangga. Ketika ditanya mengenai keuntungan usaha, mereka sering kali belum memiliki catatan yang jelas."

Temuan ini menunjukkan bahwa literasi keuangan merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan pembiayaan KUR. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Alya dan Rahman (2024) yang menemukan bahwa rendahnya kemampuan administrasi dan pengelolaan keuangan usaha menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program KUR (Sabilah & Hafizd, 2025). Dari perspektif manajemen risiko, keterbatasan informasi keuangan debitur dapat meningkatkan risiko adverse selection karena bank mengalami kesulitan menilai kondisi usaha secara objektif.

Selain itu, pihak bank juga menghadapi kendala dalam mengawasi penggunaan dana pembiayaan setelah dana dicairkan. Berdasarkan hasil penelitian, masih ditemukan debitur yang menggunakan dana KUR untuk kebutuhan konsumtif di luar kepentingan usaha. Pengalihan penggunaan dana tersebut menyebabkan modal usaha tidak berkembang secara optimal dan berdampak pada kemampuan pembayaran angsuran. Menurut Ibu Mulyani, beliau menyampaikan:

"Kami tidak bisa mengawasi penggunaan dana setiap saat karena jumlah debitur cukup banyak. Oleh karena itu, selalu ada kemungkinan sebagian dana digunakan untuk kebutuhan lain yang tidak berkaitan langsung dengan usaha."

Kondisi tersebut sejalan dengan teori *moral hazard*, yaitu perilaku debitur yang menyimpang dari tujuan awal pembiayaan setelah dana diterima. Rendahnya pengawasan serta keterbatasan jumlah tenaga kerja di lapangan menyebabkan monitoring belum dapat dilakukan secara maksimal terhadap seluruh debitur KUR.

Selain faktor internal debitur, kendala lain juga berasal dari faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas, peningkatan biaya operasional usaha, dan kondisi cuaca yang tidak menentu. Sebagian besar debitur di wilayah Sengeti menggantungkan usaha pada sektor pertanian dan perkebunan sehingga pendapatan

mereka sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan pasar. Ketika harga komoditas menurun, kemampuan debitur dalam membayar angsuran ikut mengalami penurunan.

Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian Lestari (2020) yang menunjukkan bahwa pelaku usaha menghadapi risiko akibat perubahan kondisi pasar dan lingkungan usaha (Lestari, 2020). Perbedaannya, penelitian Lestari berfokus pada risiko persaingan usaha yang memengaruhi omzet pedagang, sedangkan penelitian ini menemukan bahwa fluktuasi harga komoditas dan kondisi alam secara langsung memengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembiayaan KUR.

Temuan ini menunjukkan bahwa mitigasi risiko pembiayaan KUR tidak dapat hanya berfokus pada karakteristik individu debitur, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sektor usaha yang dibiayai. Oleh karena itu, bank perlu menerapkan pola monitoring yang berbeda pada debitur sektor pertanian dan perkebunan karena sektor tersebut memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap perubahan harga komoditas dan kondisi cuaca.

Dalam perspektif teori *adverse selection*, keterbatasan informasi mengenai kondisi usaha debitur juga menjadi tantangan tersendiri bagi pihak bank. Tidak adanya laporan keuangan yang jelas menyebabkan bank mengalami kesulitan dalam membedakan debitur yang benar-benar layak dengan debitur yang memiliki risiko gagal bayar tinggi.

Selain itu, kendala dalam komunikasi juga turut memengaruhi efektivitas mitigasi risiko. Beberapa debitur kurang terbuka dalam menyampaikan kondisi usaha yang sebenarnya ketika mengalami penurunan pendapatan. Kurangnya transparansi tersebut menyebabkan pihak bank kesulitan dalam mengambil langkah penanganan yang cepat dan tepat. Hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Mulyani:

"Ada beberapa debitur yang baru menyampaikan kondisi usahanya setelah mengalami kesulitan cukup lama. Padahal apabila informasi tersebut disampaikan lebih awal, kami dapat membantu mencari solusi yang lebih cepat."

Dari perspektif teori asimetri informasi, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan informasi antara debitur dan pihak bank. Ketika debitur tidak menyampaikan kondisi usaha secara terbuka, bank mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan pencegahan sejak dini. Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka dan hubungan yang

baik antara bank dan debitur menjadi bagian penting dari strategi mitigasi risiko pembiayaan.

Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa belum sepenuhnya tercapai tujuan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi. Rendahnya literasi keuangan dan lemahnya pengelolaan usaha menunjukkan belum optimalnya upaya menjaga harta (*hifz al-mal*), sedangkan penggunaan dana pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif bertentangan dengan prinsip amanah dan tanggung jawab dalam ekonomi Islam.

Berdasarkan keseluruhan temuan, kendala mitigasi risiko pembiayaan bermasalah pada KUR di BNI Kantor Cabang Sengeti tidak hanya bersumber dari faktor internal debitur, seperti rendahnya literasi keuangan dan moral hazard, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa fluktuasi harga komoditas dan kondisi usaha masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko pembiayaan KUR memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang mengombinasikan analisis kelayakan, monitoring berkelanjutan, edukasi keuangan, dan pendampingan usaha.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mitigasi risiko pembiayaan bermasalah KUR yang tidak hanya ditinjau dari perspektif manajemen risiko perbankan melalui teori adverse selection dan moral hazard, tetapi juga dianalisis menggunakan perspektif *Maqashid Syariah*. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik debitur yang didominasi sektor pertanian dan perkebunan menyebabkan risiko pembiayaan dipengaruhi secara signifikan oleh faktor eksternal, seperti fluktuasi harga komoditas dan kondisi cuaca, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Dengan demikian, kendala dalam mitigasi risiko pembiayaan bermasalah pada program KUR di BNI Kantor Cabang Sengeti bersifat kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui peningkatan literasi keuangan, pembinaan usaha, penguatan monitoring, serta peningkatan komunikasi antara pihak bank dan debitur agar kualitas pembiayaan tetap terjaga dan risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai mitigasi risiko pembiayaan bermasalah pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Negara Indonesia

Kantor Cabang Sengeti, dapat disimpulkan bahwa mitigasi risiko telah dilakukan secara sistematis mulai dari tahap sebelum pembiayaan diberikan hingga tahap pengawasan setelah pencairan dana. Pada tahap awal, pihak bank menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis kelayakan usaha, verifikasi dokumen, pengecekan riwayat kredit, serta survei lapangan untuk menilai karakter, kapasitas usaha, dan kondisi ekonomi calon debitur. Setelah pembiayaan dicairkan, bank melakukan monitoring dan pengawasan secara berkala melalui komunikasi rutin, kunjungan usaha, serta evaluasi perkembangan pembayaran angsuran. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, pihak bank lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan pembinaan kepada debitur, serta memberikan solusi berupa restrukturisasi pembiayaan bagi debitur yang masih memiliki potensi usaha. Strategi mitigasi risiko tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan KUR di BNI Kantor Cabang Sengeti telah berjalan cukup baik dalam menjaga kualitas pembiayaan dan menekan risiko pembiayaan bermasalah.

Namun demikian, pelaksanaan mitigasi risiko masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat kompleks dan multidimensional. Dari sisi internal debitur, kendala utama meliputi rendahnya literasi keuangan, lemahnya pengelolaan administrasi usaha, tidak adanya pembukuan yang tertata, serta penggunaan dana pembiayaan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan produktif usaha. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kecenderungan moral hazard yang berdampak pada menurunnya kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Sementara itu, dari sisi eksternal, faktor seperti fluktuasi harga komoditas, kondisi cuaca, serta ketidakstabilan ekonomi masyarakat turut memengaruhi keberlangsungan usaha debitur, khususnya pada sektor pertanian dan perkebunan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan monitoring secara intensif serta kurang optimalnya keterbukaan debitur dalam menyampaikan kondisi usaha juga menjadi hambatan dalam proses mitigasi risiko. Oleh karena itu, keberhasilan pengendalian risiko pembiayaan KUR tidak hanya bergantung pada sistem dan kebijakan yang diterapkan oleh bank, tetapi juga memerlukan peningkatan literasi keuangan, kedisiplinan, serta kesadaran debitur dalam mengelola usaha dan menjalankan kewajiban pembiayaan secara bertanggung jawab.

Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Sengeti disarankan untuk meningkatkan edukasi dan pendampingan usaha kepada debitur KUR, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Selain itu, penguatan monitoring pembiayaan melalui kunjungan lapangan maupun pemanfaatan teknologi digital perlu dilakukan untuk mendeteksi potensi pembiayaan bermasalah sejak dini. Pengawasan terhadap penggunaan dana pembiayaan juga perlu ditingkatkan guna meminimalkan risiko moral hazard. Bagi debitur, diperlukan pengelolaan usaha yang lebih tertib, terutama dalam pencatatan keuangan dan pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi agar kemampuan pengelolaan usaha dan pembayaran kewajiban dapat berjalan lebih optimal.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, P. A., & Jannah, N. (2024). *As-Syirkah : Islamic Economics & Finacial Journal*. 3, 15–33. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i1.175>
- Adesty, R. (2025). Maqashid Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(6), 274–284.
- Al Wardhana, E Silaningsih, T. K. (2025). *Peningkatan Kompetensi Pelaku UMKM melalui Program Pelatihan*.
- Aini, N., Putri, E., Asmeri, R., Yuli, S., & Putri, A. (2024). *Pengaruh Non Performing Loan (NPL) dan Return On Asset (ROA) Terhadap Penyaluran Kredit (Studi pada Bank Umum Konvensional yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021)*. 2(3), 278–288.
- Alya, U., & Rahman, T. (2024). *Program Strategi Kur Bank Syariah Indonesia Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kota Batu*. 10(1), 74–84.
- Alya, Ulka, and Taufiqur Rahman. “Strategi Program KUR Bank Syariah Indonesia Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Kota Batu.” *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah* 10, no. 1 (June 2024):74–84. <https://doi.org/10.30997/jn.v10i1.13305>.
- Andriyani, R. (2023). Implementasi Pembiayaan PNM Mekar Dalam Meningkatkan Usaha Mikro. *JEKSy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 02(01), 313–327. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSy>
- April, N., Salsabila, P., Lubis, I., & Salsabila, R. (2024). *Peran UMKM (Usaha Mikro , Kecil , Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia*. 2(3).
- Aziz, A., Belakang, A. L., Kkp-e, P. E., Pengembangan, K., Nabati, E., Pembibitan, U., & Kups, S. (2016). *ANALISIS SKEMA ALTERNATIF KREDIT PROGRAM UNTUK USAHA MIKRO , KECIL , DAN MENENGAH Pertama* ., 143–157.
- Christiana, I., Saputra, N., & Putri, L. P. (2024). *Determinan Perilaku Keuangan Gen Z: Antara Literasi Keuangan , Financial Technology dan Gaya Hidup Hedonis*.
- Dalimunthe, N., & Lubis, N. K. (2023). Peran lembaga perbankan terhadap pembangunan ekonomi Fungsi dan tujuannya dalam menyokong ketenagakerjaan. *Jurnal Masharif Al-Syariah Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(4)..pdf. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(4), 956–963.
- Efendi, M. R. (2025). *Peran perbankan dalam mendukung permodalan umkm melalui program kredit usaha rakyat*. 3(1), 34–40.
- Fatkhullah, I., & Zen, M. (2026). *DALAM MODEL PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH*. 5.
- Husnullail, M. (2024). Teknik Pemeriksaan Data Dalam Riset Ilmiah. *Genta Mulia*, 15(2), 70–78.
- Ikhsani Wardhana, A., Silaningsih, E., & Kartini, T. (2025). Peningkatan Kompetensi Pelaku UMKM melalui Program Pelatihan dan Pendampingan di Desa Margaluyu, Tanjungsari Sumedang. *Motivasi*, 10(1), 44–54. <https://doi.org/10.32502/motivasi.v10i1.631>
- Kase, A. D., Sukiatni, D. S., & Kusumandari, R. (2023). *Resiliensi remaja korban kekerasan seksual di Kabupaten Timor Tengah Selatan : Analisis Model Miles dan Huberman Pendahuluan*. 3(2), 301–311.
- Lestari, E. D. (2020). *PENGARUH PERSEPSI LINGKUNGAN BISNIS INTRAPRENUER DAN RISK PROPENSITY TERHADAP NIAT KEWIRAUSAHAAN (STUDI TERHADAP KEPALA CABANG LEASING ABC)*. 11(2), 115–132.
- Makandolu, S. M., Sogen, J. G., & Henuk, Y. L. (2014). *Analisis Karakteristik Debitur Umkm Bidang Pertanian Bank Ntt Kantor Cabang Utama Kupang (Characteristics Analysis of Micro , Small and Medium Enterprises (Smes) Debtors in Integrated Agricultural Sector At Ntt Bank - Main Branch Office of Kupang)*. 1(1).
- Masdiana, S., Haidar, A. M., & Gani, I. (2025).

- BANK SYARIAH SEBAGAI PILAR SISTEM KEUANGAN ISLAM: ANALISIS KEDUDUKAN DAN PERAN DI INDONESIA. 2(1), 80–94.
- Mutmainah, A. (2025). Pengaruh Financing To Deposit Ratio (*fd*r), Non Performing Financing (*npf*), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (*bopo*) Terhadap Return On Assets (*roa*). 2(2).
- Naheri, Rabiatul Adawiyah, & Rahman Ambo Masse. (2024). Strategi Pengembangan Baitul Mal Wattamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil Danmenengah. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2), 238–247. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.376>
- Noviansyah, A., Lutfi, A., & Shebubakar, A. N. (2025). Praktik Usaha Fiktif dalam Pengajuan Kredit Usaha Rakyat dan Tantangan Pencegahannya. *Binamulia Hukum*, 14(1), 141–156. <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1009>
- Pradita, D. W. B. (2013). Analisis karakteristik debitur yang mempengaruhi tingkat pengembalian kredit guna menanggulangi terjadinya Non Performing Loan (NPL).
- Qomariyah, N. U., & Febriana, I. K. (2025). Analisis Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Pegadaian terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah. 5(1), 444–452.
- Rahardiansyah, R. F., Purnamaputra, M. Z., Dhea, P. A., & Wilujeng, P. S. (2022). Indikasi moral hazard dan strategi mitigasi risiko dalam pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di indonesia. 11(1), 119–151.
- Rahmawati, A. (2020). Dampak Risiko Pembiayaan , Risiko Likuiditas Dan. 8(2), 185–198.
- Rosalina, R., & Lestari, M. N. (2019). PENGARUH NON PERFORMING LOAN (NPL) TERHADAP PENYALURAN KREDIT (Suatu Studi pada Pt. Bank Negara Indonesia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2017). 1.
- Sabilah, S., & Hafizd, J. Z. (2025). Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Cirebon Dr Cipto Mangunkusumo. 02(01), 15–26.
- Samsu, S., Pengakuan, A., ... D., Saharia, O. ., Fakultas, S., Jurusan, E., Universitas, A., & Manado, S. R. (2013). Analisis Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan Psak No. 23 Pada Pt. Misa Utara Manado. *Jurnal EMBA*, 5671(3), 567–575.
- Shafira Putri, N., Idris, M., & Asiati, D. I. (2025). Peran Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Motivasi terhadap Produktivitas melalui Kepuasan Kerja. *Motivasi*, 10(1), 22–32. <https://doi.org/10.32502/motivasi.v10i1.552>
- Sitanggang, R. M., Lubis, A., Aprinawati, & Sitanggang, K. G. (2025). Pengaruh Citra Merek dan Ulasan Pelanggan terhadap Kepercayaan Konsumen Shopee di Medan Johor. *Motivasi*, 10(1), 1–12. <https://doi.org/10.32502/motivasi.v10i1.579>
- Sudanto. (2024). Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 12288–12300.
- Sugiyono. (2023). METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF dan R&D (Sutopo (ed.)).
- Sunaryo, D., Kurnia, D., Adiyanto, Y., & Quraysin, I. (2021). Pengaruh risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko operasional terhadap profitabilitas perbankan pada bank umum di asia tenggara periode 2012-2018. 11(1).
- Ulfa, M. (2020). Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat pada Sektor Usaha Mikro terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar. 11(1), 17–28. <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v11i1.1294>
- Yulianti, M., Doa, M., & Bure, M. (2025). Analisis Resiko Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Anggota Terhadap Stabilitas Keuangan Pada KSP CU Bahtera Sejahtera. 12(3), 24–33.